

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Setiap daerah mempunyai corak pertumbuhan ekonomi yang berbeda dengan daerah lain. Oleh sebab itu perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah pertama-tama perlu mengenali karakter ekonomi, sosial dan fisik daerah itu sendiri, termasuk interaksinya dengan daerah lain. Dengan demikian tidak ada strategi pembangunan ekonomi daerah yang dapat berlaku untuk semua daerah. Namun di pihak lain, dalam menyusun strategi pembangunan ekonomi daerah, baik jangka pendek maupun jangka panjang, pemahaman mengenai teori pertumbuhan ekonomi wilayah, yang dirangkum dari kajian terhadap pola-pola pertumbuhan ekonomi dari berbagai wilayah, merupakan satu faktor yang cukup menentukan kualitas rencana pembangunan ekonomi daerah.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses kerja antara Pemerintah Daerah dan masyarakatnya dalam mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Kuncoro, 2003; Arsyad 1999).

Pembangunan dalam lingkup negara secara spasial tidak selalu merata. Kesenjangan daerah selalu menjadi permasalahan serius. Beberapa daerah mencapai pertumbuhan cepat, sementara beberapa daerah lain mengalami pertumbuhan yang lambat. Daerah-daerah tersebut tidak mengalami pertumbuhan yang sama karena sumber-sumber yang dimilikipun berbeda. Adanya kecenderungan peranan modal (investor) memilih daerah perkotaan atau daerah yang memiliki fasilitas seperti prasarana perhubungan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, perbankan, asuransi, dan tenaga kerja yang terampil, disamping itu juga adanya ketimpangan redistribusi pembagian pendapatan dari pemerintah pusat kepada daerah.

Di dalam RTRW ditegaskan bahwa titik berat pembangunan jangka panjang adalah pembangunan dalam bidang ekonomi, yang berarti bahwa

sebagian besar dari usaha pembangunan diarahkan kepada pembangunan ekonomi, sedangkan pembangunan bidang-bidang lainnya bersifat menunjang dan melengkapi bidang ekonomi. Maka, salah satu kebijakan yang diambil pemerintah untuk mempersempit kesenjangan adalah dengan perencanaan tata ruang.

Kabupaten Sukoharjo sebagai tempat pertumbuhan wilayah akan menyebabkan terjadinya perubahan dan pembangunan struktural di daerah hinterland. Berdasarkan hal tersebut penentuan wilayah pembangunan untuk kebijaksanaan di Kabupaten Sukoharjo dibagi menjadi 6 (enam) Sub Wilayah Pembangunan (SWP) yaitu:

1. Sub Wilayah Pembangunan I  
Meliputi wilayah Kecamatan Kartasura dan Gatak dengan pusat pengembangan di Kota Kartasura.
2. Sub Wilayah Pembangunan II  
Meliputi wilayah Kecamatan Grogol dan Baki dengan pusat pengembangan di Kota Grogol.
3. Sub Wilayah Pembangunan III  
Meliputi wilayah Kecamatan Mojolaban, Polokarto, dan Bendosari bagian utara, selatan, dan timur dengan pusat pengembangan di Kota Mojolaban.
4. Sub Wilayah Pembangunan IV  
Meliputi wilayah Kecamatan Sukoharjo, Bendosari bagian barat dengan pusat pengembangan di Kota Sukoharjo.
5. Sub Wilayah Pembangunan V  
Meliputi wilayah Kecamatan Nguter dengan pusat pengembangan di Kota Nguter.
6. Sub Wilayah Pembangunan VI  
Meliputi wilayah Kecamatan Tawang Sari, Bulu, dan Weru dengan pusat pengembangan di kota Tawang Sari.

(Sumber : RTRW Kabupaten Sukoharjo)

Landasan keberhasilan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor. Fakta-fakta yang mendasari adanya ketimpangan

pendapatan antar daerah dan antar sektor di Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat dari besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kecamatan. Sedangkan ketimpangan antar daerah ditunjukkan banyaknya jumlah fasilitas sosial ekonomi, dan distribusi jumlah penduduk antar kecamatan.

Kesenjangan pertama tampak dari PDRB kabupaten Sukoharjo menurut sektor-sektor ADHK tahun 2004 dan 2008. Dari jenjang selama empat tahun tersebut, ternyata hanya 3 sektor yang selalu unggul di kabupaten Sukoharjo yaitu industri pengolahan; perdagangan, hotel&restoran; dan pertanian. Hal ini dapat dilihat dari besarnya persentase tiap sektor terhadap PDRB kabupaten.

Tabel 1.1

PDRB Kabupaten Sukoharjo Menurut Sektor-Sektor dan Distribusi Prosentase Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2004 dan 2008 (Jutaan Rupiah)

No	Sektor-Sektor	Tahun 2004		Tahun 2008	
		PDRB	%	PDRB	%
1	Pertanian	757.823,02	20,00	920.118,11	20,26
2	Pertambangan dan Penggalian	33.198,58	0,87	35.355,30	0,77
3	Industri Pengolahan	1.162.044,49	30,69	1.359.291,24	29,93
4	Listrik, Gas&Air Bersih	36.532,38	0,96	46.449,85	1,02
5	Bangunan	147.012,09	3,88	190.859,79	4,20
6	Perdagangan, Hotel &Restoran	1.057.987,10	27,94	1.263.767,82	27,83
7	Pengangkutan &Komunikasi	161.747,80	4,27	198.992,58	4,38
8	Keuangan,Sewa&Jasa Perusahaan	127.049,88	3,35	156.912,96	3,45
9	Jasa-jasa	302.817,38	7,99	369.003,89	8,12
	<b>Total</b>	<b>3.786.212,72</b>	<b>100,00</b>	<b>4.540.751,54</b>	<b>100,00</b>

Sumber: PDRB Sukoharjo Tahun 2008

Secara sektoral peranan sektor industri merupakan sektor yang mempunyai andil terbesar di kabupaten Sukoharjo yaitu 30,69 % pada tahun 2004 dan mengalami penurunan pada tahun 2008 yaitu 29,93%. Sedangkan untuk sektor perdagangan, sektor ini tercatat di urutan kedua setelah sektor industri. Hal ini membuktikan bahwa sektor perdagangan ini mempunyai peranan penting dalam perekonomian di kabupaten Sukoharjo. Diurutan berikutnya sektor pertanian, pada tahun 2008 merupakan sektor sebagai penyumbang pendapatan wilayah

terbesar yaitu 20,26%. Sektor pertanian ini ternyata mampu menopang perekonomian masyarakat Sukoharjo. Hal ini terbukti dari besarnya PDRB tahun 2004 dan 2008, dimana sektor ini masih mempunyai andil cukup besar untuk meningkatkan PDRB Kabupaten.

Pembangunan yang semarak di segala sektor ekonomi, pada lima tahun terakhir ini (2004-2008) sudah mulai menjanjikan. Karena distribusi dan pertumbuhan sudah mulai ke arah positif. PDRB Kabupaten Sukoharjo didominasi oleh 3 kecamatan yaitu Grogol, Sukoharjo, dan Kartasura. Dengan total PDRB sebesar 4,54 juta rupiah pada tahun 2008, maka Grogol dengan PDRB terbesar di Kabupaten Sukoharjo. Sedangkan sharing yang diberikan Grogol terhadap PDRB Kabupaten Sukoharjo sebesar 24,54%. Di urutan berikutnya tercatat kecamatan Sukoharjo dengan andil 19,93 % disusul kecamatan Kartasura yang mempunyai andil 15,86 %. Sementara itu kecamatan Bulu merupakan kecamatan dengan tingkat partisipasi terendah dengan PDRB sebesar 2,97 %. Dan di atasnya disusul oleh kecamatan Baki yang mempunyai andil 3,21 %. Sedangkan kecamatan lainnya mempunyai andil berkisar antara 3,22 % sampai 7,05 %.

Tabel 1.2

PDRB Kabupaten Sukoharjo Per Kecamatan dan Kontribusi PDRB Kecamatan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2004 dan 2008

SWP	Kecamatan	Tahun 2004		Tahun 2008	
		PDRB	%	PDRB	%
I	Kartasura	244.820,83	18,91	720.169,73	15,86
	Gatak	56.607,29	4,37	146.639,54	3,22
II	Baki	41.524,78	3,20	146.003,69	3,21
	Grogol	297.557,58	22,99	1.114.413,80	24,54
III	Mojolaban	75.818,69	5,85	320.287,64	7,05
	Polokarto	70.314,44	5,43	244.075,33	5,37
	Bendosari	76.560,12	5,91	246.965,15	5,43
IV	Sukoharjo	240.559,93	18,58	905.025,97	19,93
V	Nguter	55.211,73	4,26	191.079,14	4,20
VI	Tawang Sari	51.023,59	3,94	198.480,05	4,37
	Bulu	37.675,55	2,91	135.063,57	2,97
	Weru	46.495,89	3,59	172.547,91	3,79
	<b>Total</b>	<b>1.294.170,42</b>	<b>100,00</b>	<b>4.540.751,50</b>	<b>100,00</b>

Sumber: PDRB Sukoharjo Tahun 2004&2008

Dengan memperhatikan besarnya disparitas PDRB persektor dan kontribusi PDRB Kecamatan terhadap PDRB Kabupaten, menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan pendapatan regional antar kecamatan dan antar sektor. Selanjutnya, kenyataan yang ada bahwa kesenjangan pendapatan regional ini, menimbulkan permasalahan sosial. Diantara permasalahan sosial tersebut adalah kesenjangan mengenai tingkat kepadatan penduduk, ketersediaan fasilitas perdagangan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas perhubungan.

Kesenjangan mengenai tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada tabel 1.2 dimana tingkat kepadatan penduduk tertinggi tahun 2008 berada di Kecamatan Kartasura yaitu sebesar 4.681 jiwa/km<sup>2</sup>. Sedangkan yang terendah yaitu Kecamatan Nguter sebesar 1.173 jiwa/km<sup>2</sup>. Rata-rata kepadatan penduduk di Kabupaten Sukoharjo sebesar 1.794 jiwa/km<sup>2</sup>. Sehingga kecamatan yang mempunyai tingkat kepadatan dibawah rata-rata adalah Kecamatan Weru, Tawangsari, Bendosari, Polokarto, Bulu, dan Nguter. Ketimpangan dalam distribusi kepadatan penduduk ini akan berpengaruh terhadap PDRB perkapita masing-masing kecamatan, mengingat PDRB perkapita merupakan hasil bagi PDRB kecamatan dengan jumlah penduduk.p

Tabel 1.3 Data Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Sukoharjo  
Tahun 2004 dan 2008

SWP	Kecamatan	2004			2008		
		Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )	Persentase Jmlh pndk (%)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )	Persentase Jmlh pndk (%)
I	Kartasura	87.783	4.564	10,76	90.011	4.681	10,75
	Gatak	46.581	2.392	5,71	48.058	2.468	5,73
II	Baki	50.970	2.319	6,25	52.337	2.382	6,25
	Grogol	97.273	3.242	11,93	102.307	3.410	12,21
III	Mojolaban	75.808	2.139	9,30	78.465	2.208	9,37
	Polokarto	72.083	1.159	8,84	74.173	1.193	8,85
	Bendosari	64.778	1.224	7,94	66.823	1.261	7,98
IV	Sukoharjo	80.970	1.816	9,93	83.948	1.883	10,02
V	Nguter	64.231	1.170	7,88	64.364	1.173	7,68
VI	Tawangsari	57.659	1.442	7,07	58.450	1.462	6,98
	Bulu	51.566	1.244	6,32	51.600	1.176	6,61
	Weru	65.887	1.569	8,08	66.743	1.590	7,97
	<b>Jumlah</b>	<b>815.089</b>	<b>1.746</b>	<b>100,00</b>	<b>837.279</b>	<b>1.794</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Sukoharjo dalam Angka 2008/2009

Pada tahun 2004, kabupaten Sukoharjo berpenduduk 815.085 jiwa dan pada tahun 2008 meningkat menjadi 837.279 jiwa atau naik sebesar 2,7%. Pertumbuhan ini selain disebabkan oleh angka kelahiran juga disebabkan mobilitas penduduk dari luar kabupaten Sukoharjo. Dengan adanya pertumbuhan penduduk ini, akan berpengaruh terhadap kebutuhan fasilitas pelayanan sosial ekonomi. Adanya fasilitas pelayanan sosial ekonomi maka menjadikan Kabupaten Sukoharjo sebagai tempat tujuan penduduk memenuhi kebutuhan sosial ekonominya.

Penduduk melakukan berbagai macam kegiatan perekonomian guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan tersebut memerlukan sarana perekonomian yang mendukung seperti pasar, koperasi, dan bank. Kesenjangan yang ketiga adalah ketersediaan fasilitas perdagangan yang berupa pasar, koperasi, dan bank. Hal ini dapat diketahui dari banyaknya koperasi dari beberapa kecamatan di Kabupaten Sukoharjo dimana yang terbanyak ada 124 unit dan yang paling rendah ada 18 unit. Ketidakmerataan yang lainnya juga terdapat dalam hal penyediaan pasar dan Bank.

Kesenjangan yang keempat adalah ketersediaan fasilitas kesehatan, dimana berdasar rasio perbandingan ketersediaan riil dengan jumlah penduduk terjadi ketidakmerataan yang cukup tinggi pada penyediaan rumah sakit. Dari 12 kecamatan yang ada, hanya 4 kecamatan yang mempunyai rumah sakit yaitu Kecamatan Kartasura, Grogol, Bendosari, dan Sukoharjo. Ketidakmerataan yang lainnya juga terdapat dalam hal penyediaan apotek, rumah bersalin, balai pengobatan, puskesmas pembantu, dan puskesmas. Namun ketidakmerataan ini tidak sebesar dalam penyediaan rumah sakit.

Kesenjangan yang kelima adalah ketersediaan fasilitas pendidikan, dimana ketidakmerataan yang cukup tinggi terdapat pada penyediaan perguruan tinggi. Di Kabupaten Sukoharjo mempunyai 8 perguruan tinggi yang tersebar di 4 kecamatan yaitu Kecamatan Kartasura (5), Grogol (1), Bendosari (1), dan Sukoharjo (1). Sedangkan dalam hal penyediaan SD, SMP, dan SMA hampir di semua kecamatan tersedia, walaupun tidak semuanya dikatakan merata.

Kesenjangan keenam tampak pada penyediaan fasilitas perhubungan terutama ketersediaan terminal. Jumlah total terminal yang ada di Kabupaten Sukoharjo adalah 8. Masing-masing berada di kecamatan Kartasura (2), Sukoharjo (2), Tawang Sari (2), dan Weru (2). Hal ini mengindikasikan adanya ketimpangan yang cukup tinggi dalam hal penyediaan sarana perhubungan. Padahal kelengkapan sarana transportasi sangat menentukan kelancaran dalam interaksi antar kecamatan di Kabupaten Sukoharjo dan antar wilayah utama wilayah SUBOSUKOWONOSRATEN.

Berdasar data yang ada, Kabupaten Sukoharjo mempunyai sumbangan cukup berarti dalam beberapa sektor ekonomi pada tingkat nasional. Namun dibalik perkembangan sektor ekonomi seperti sektor pertanian, industri, dan perdagangan, terdapat permasalahan lain yang ditimbulkan yaitu berupa pemerataan dan ketidakmerataan antar wilayah. Sehingga, isu ekonomi di Kabupaten Sukoharjo ini cukup menarik sekali untuk dikaji.

Dengan memperhatikan perkembangan wilayah di kabupaten Sukoharjo yang berupa perkembangan ekonomi, maka penulis bermaksud mengadakan penelitian dengan judul Kajian Pertumbuhan Ekonomi Wilayah di Kabupaten Sukoharjo Periode 2004-2008.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang dan pengamatan di lapangan, dapat dirumuskan permasalahan yang ada sebagai berikut:

1. Bagaimana pola pertumbuhan ekonomi antar wilayah di Kabupaten Sukoharjo?
2. Sektor apakah yang paling berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi antar wilayah di Kabupaten Sukoharjo?
3. Sektor apakah yang termasuk sektor unggulan antar wilayah Kabupaten Sukoharjo?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui pola pertumbuhan ekonomi wilayah di Kabupaten Sukoharjo.
2. Mengetahui sektor yang paling berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi antar wilayah di Kabupaten Sukoharjo.

3. Mengetahui sektor unggulan di wilayah Kabupaten Sukoharjo.

#### 1.4 Kegunaan Penelitian

1. Sebagai evaluasi atas pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Sukoharjo, yang berkaitan dengan pewilayahan pembangunan.
2. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta.

#### 1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya

Menurut Bintarto dan Surastopo (1979), geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kewilayahan, keruangan, kelingkungan, dan kompleks wilayah. Obyek materi pertama adalah kaitannya dengan beberapa aspek kehidupan manusia, lingkungan, dan aspek pembangunan. Adapun obyek formal adalah cara memandang dan cara berfikir terhadap obyek material tersebut dari segi keruangan yang meliputi pola, sistem, dan proses.

Todaro dalam bukunya Kuncoro (2003) menyatakan bahwa tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, harus pula menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran.

Perroux dengan "*pole de croissance*" atau "*pole of growth*" dalam bukunya Sadono Sukirno (1976), mengungkapkan bahwa pertumbuhan tidak muncul di berbagai daerah pada waktu yang sama tetapi hanya terjadi di beberapa tempat atau pusat pertumbuhan dengan intensitas yang berbeda dengan akibat akhir yang ditimbulkannya berbeda pula terhadap keseimbangan perekonomian. Hakekat dari teori Perroux mengenai pembangunan daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Di dalam industri proses pembangunan akan muncul *L'industrie Moxfice* atau industri pemimpin yang merupakan suatu industri yang menjadi penggerak utama dalam pembangunan suatu daerah.
2. Apabila industri-industri terkumpul dalam suatu daerah atau kawasan tertentu, keadaan ini akan memperlancar proses pertumbuhan ekonomi. Sebabnya adalah karena pengelompokan industri tadi akan menciptakan



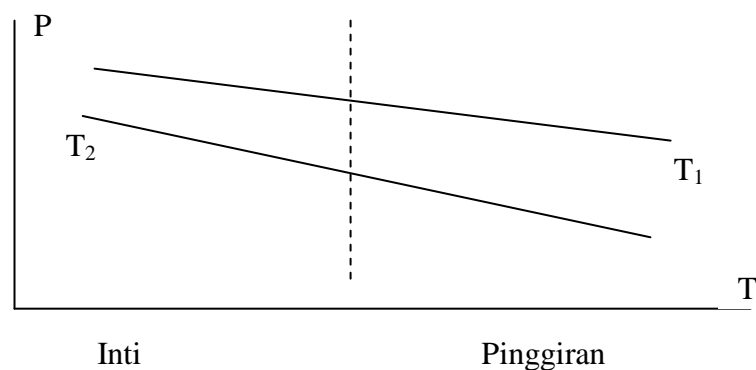
konsumen-konsumen yang mempunyai konsumsi berbeda-beda dengan penduduk daerah pedesaan, permintaan perumahan, pengangkutan dan jasa-jasa pemerintah akan muncul berbagai jenis produsen dan pekerja-pekerja mahir akan berkembang dan rangka dasar industri akan terbentuk.

3. Karena secara geografis pembangunan ekonomi tidak seimbang maka suatu perekonomian pada hakikatnya merupakan gabungan dari sistem yang secara relatif keadaannya terdiri dari industri-industri atau daerah-daerah yang tergantung pada kegiatan di pusat pertumbuhan.

Gunar Myrdall (1967) memformulasikan sebab-sebab bertambah buruknya ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar wilayah. Ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar wilayah sebagaimana diuraikan oleh Myrdal adalah teori “*circular* dan *cumulative causation*” yang berasumsi bahwa pertumbuhan mengalir dari pusat ke bawah (ke daerah sekitar). Circular dan cumulative causation merupakan suatu mekanisme dasar dimana perubahan yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan industri itu sendiri melalui suatu rentetan yang kumulatif dan circular sifatnya.

Menurut Myrdal (1967), perbedaan tingkat kemajuan ekonomi antar daerah yang berlebihan akan menyebabkan pengaruh yang merugikan (*Backwash Effects*) mendominasi pengaruh yang menguntungkan (*Spread Effects*) terhadap pertumbuhan daerah, dalam hal ini mengakibatkan proses ketidakseimbangan. Pelaku-pelaku yang mempunyai kekuatan di pasar secara normal akan cenderung meningkat bukan menurun, sehingga mengakibatkan ketimpangan antar daerah. (Kuncoro, 2003)

**Gambar 1.1 Pengaruh “SPREAD EFFECT”**



Sumber : Hugget (1979) Keterangan: T : waktu

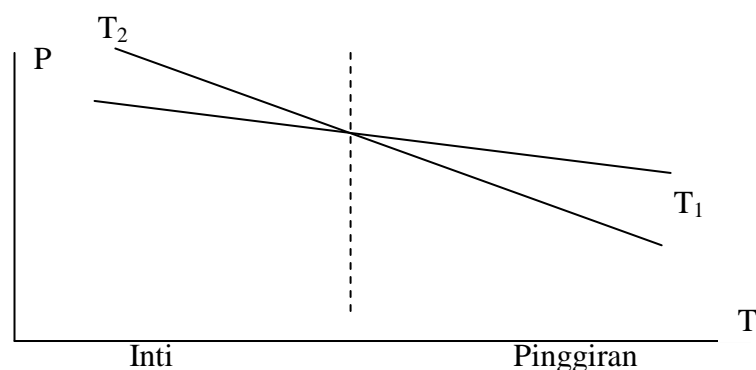
P : pertumbuhan

Jika pertumbuhan suatu wilayah berdampak positif, dimana perkembangan yang terjadi di wilayah inti diikuti dengan wilayah sekitarnya, maka proses pertumbuhan ekonomi di wilayah demikian dinamakan “*Spread Effects*”. Proses pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, jika yang lebih dominan pada suatu wilayah adalah *Spread Effects* maka perubahan yang terjadi cenderung kearah pemerataan pertumbuhan ekonomi antar wilayah.

Perubahan-perubahan yang berlangsung pada  $T_2$  akan mengikuti arah perubahan yang berlangsung pada  $T_1$ . Kecenderungan perubahan di wilayah inti disebut perubahan yang bersifat positif. Perubahan ini tidak mengarah pada kesenjangan atau ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi antar wilayah inti dengan pinggiran. Sebagai contoh, seluruh daerah yang berada di sekitar suatu pusat pertumbuhan memperoleh keuntungan dari bertambah besarnya penampungan hasil-hasil pertanian dari wilayah sekitarnya, dan juga akan mendorong penggunaan kemajuan teknologi di segala bidang sehingga akan mendorong naiknya pendapatan penduduk.

Jika pertumbuhan suatu wilayah berdampak negatif, dimana perubahan-perubahan yang terjadi di wilayah inti hanya memberikan hasil yang positif terhadap wilayahnya sendiri, maka proses pertumbuhan ekonomi di wilayah demikian dinamakan “*Backwash Effects*”.

**Gambar 1.2 PENGARUH “BACKWASH EFFECTS”**



Sumber : Hugget (1979)

Keterangan: T : waktu

P : pertumbuhan

Perubahan - perubahan yang terjadi pada  $T_1$  disuatu pusat pertumbuhan hanya menghasilkan sesuatu yang positif bagi suatu pusat pertumbuhan itu sendiri. Perubahan pada  $T_1$  akan mendorong perubahan pada  $T_2$  dalam arah perubahan yang bertolak belakang. Dimana bila arah perubahan pada  $T_1$  menunjukkan gerak naik, maka  $T_2$  akan menunjukkan menurun. Sehingga arah pertumbuhan antara wilayah inti dengan wilayah pinggiran adalah menuju ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi.

Dalam ilmu Geografi terdapat 3 pendekatan utama, yaitu *spatial approach*, *Ecological approach*, dan *Regional complex approach*. Dimana dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kompleks wilayah (*Regional complex approach*). Menurut Hadi Sabari Yunus (2010) analisis kompleks wilayah dipahami bahwa pada suatu wilayah yang ada di permukaan bumi ini, didalamnya terdapat berbagai sub wilayah yang berbeda satu dengan yang lainnya. Sementara itu, berbagai sub wilayah yang ada memiliki elemen-elemen wilayah yang berbeda-beda terjalin sedemikian rupa dalam sistem keterkaitan dimana masing-masing wilayah sistem berinteraksi dengan wilayah sistem yang lain.

Hierarki perkotaan menggambarkan jenjang fungsi perkotaan sebagai akibat perbedaan jumlah, jenis, dan kualitas dari fasilitas yang tersedia di kota tersebut. Atas dasar perbedaan itu, volume dan keragaman pelayanan yang dapat diberikan setiap jenis fasilitas juga berbeda. Perbedaan ini umumnya terkait langsung dengan perbedaan besarnya kota ( jumlah penduduk ). Perbedaan fungsi ini juga sekaligus menggambarkan perbedaan luas pengaruh. Terlaksananya fungsi itu berkaitan dengan fasilitas kepentingan umum yang akan dibangun di masing-masing kota. Banyaknya fasilitas yang harus tersedia dimasing-masing kota harus sejalan dengan luas pengaruh kota tersebut, atau jumlah penduduk yang diperkirakan akan memanfaatkan fasilitas tersebut.

Perbedaan tingkat kemajuan yang terjadi di suatu wilayah terkait erat sistem dan konfigurasi spasial suatu wilayah. Tidak terdapatnya sistem spasial yang integratif memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap makin besarnya kesenjangan wilayah. Menurut Sukirno (1977) faktor yang menjadi penyebab pertumbuhan wilayah adalah luas tanah (termasuk kekayaan alam),

jumlah, dan perkembangan penduduk, stok modal dan perkembangannya, serta tingkat teknologi. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan ekonomi wilayah menurut Myrdal ada 2 yaitu :

a. Faktor ekonomi

meliputi industri, perdagangan, dan pertanian.

b. Faktor Non ekonomi

meliputi transportasi, pendidikan, keberadaan pasar dan lembaga keuangan, pertumbuhan pasar.

Lewis(1967) dalam bukunya Ernan Rustiadi, dkk(2009) berpendapat bahwa perkembangan suatu wilayah akan mengalami stagnasi bila hanya satu sektor saja yang dikembangkan. Dengan demikian langkah yang paling tepat dalam pembangunan seimbang antar beberapa sektor adalah bahwa output dari masing-masing sektor ekonomi berhubungan secara komplementer. Dengan demikian lebih dijamin adanya pertumbuhan permintaan yang seimbang antar sektor, sehingga pertumbuhan sektor akan terus berimbang.

Faktor yang membuat suatu wilayah mempunyai keunggulan antara lain:

- a. Faktor alam., upah buruh rendah, dan kebijakan pemerintah.
- b. Masyarakatnya menguasai teknologi, punya keterampilan khusus dan Mentalitas masyarakat yang sesuai dengan pembangunan
- c. Wilayah tersebut dekat dengan pasar, aksesibilitas tinggi.
- d. Daerah konsentrasi dari kegiatan sejenis, daerah aglomerasi dari berbagai kegiatan. (Lincoln Arsyad, 2010)

Puji Widodo (2002) dalam penelitiannya yang berjudul Evaluasi Geografis Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Wilayah di Kabupaten Semarang Periode 1994-1997 menyebutkan bahwa berdasarkan hierarki kecamatan yang terbukti bahwa kecamatan dengan hierarki tertinggi menjadi central place bagi kecamatan di sekitarnya. Namun dari hasil penelitian ini juga didapatkan bahwa terdapat kecamatan yang berkedudukan sebagai pusat pengembang, tetapi menempati hierarki lebih rendah dibanding dengan kecamatan cakupannya.

Kecenderungan pertumbuhan ekonomi di kabupaten Semarang terjadi dua proses yaitu *spread effects* dan *backwash effects*. *Spread effects* terjadi karena

Kecamatan Ungaran dan Ambarawa yang berkedudukan sebagai SWP I dan SWP II menempati hierarki tertinggi, dan mampu mendorong pertumbuhan wilayah sekitarnya. Hasil lain dari penelitian ini membuktikan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Semarang dengan kontribusi sebesar 82,4 %.

Nugroho Adi Prabowo (2005) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Tingkat Perkembangan Wilayah di Sub Wilayah Pembangunan (SWP) I Kabupaten Boyolali Jawa Tengah, menghasilkan bahwa secara umum distribusi fasilitas pelayanan ekonomi di SWP I Kabupaten Boyolali tersebar merata. Daya fasilitas sosial ekonomi kategori baik yaitu Kecamatan Banyudono dan Sawit dengan skor 30. Adapun kelas daya layan sedang berada di Kecamatan Ngemplak dan Mojosongo dengan skor 28. Sedangkan kategori kelas rendah terdapat di Kecamatan Teras dengan skor 27.

Hasil yang lain adalah adanya hubungan yang positif antara ketersediaan dan daya layan fasilitas sosial ekonomi tingkat perkembangan wilayah. Artinya makin banyak ketersediaan dan makin daya layan fasilitas sosial ekonomi, makin tinggi pula tingkat perkembangan wilayahnya.

Tri Murtopo (2009) dalam penelitiannya Kajian Tingkat Perkembangan Wilayah untuk Penentuan prioritas Pengembangan di Kabupaten Boyolali Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan tingkat perkembangan wilayah dan pola persebarannya, serta menetapkan wilayah prioritas pengembangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola perkembangan wilayah Kabupaten Boyolali untuk tingkat perkembangan rendah, sedang, dan tinggi pada tahun 2006 yaitu memiliki pola cenderung seragam (uniform), acak (random), dan mendekati seragam (uniform). Selanjutnya, dalam rangka untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah maka dibuat prioritas pengembangan. Prioritas pengembangan dilakukan dengan dua analisa yaitu analisa komparatif nilai potensi sosio demografi, kontribusi tenaga kerja disektor industri dan aksesibilitas wilayah tahun 2002 dan 2006.

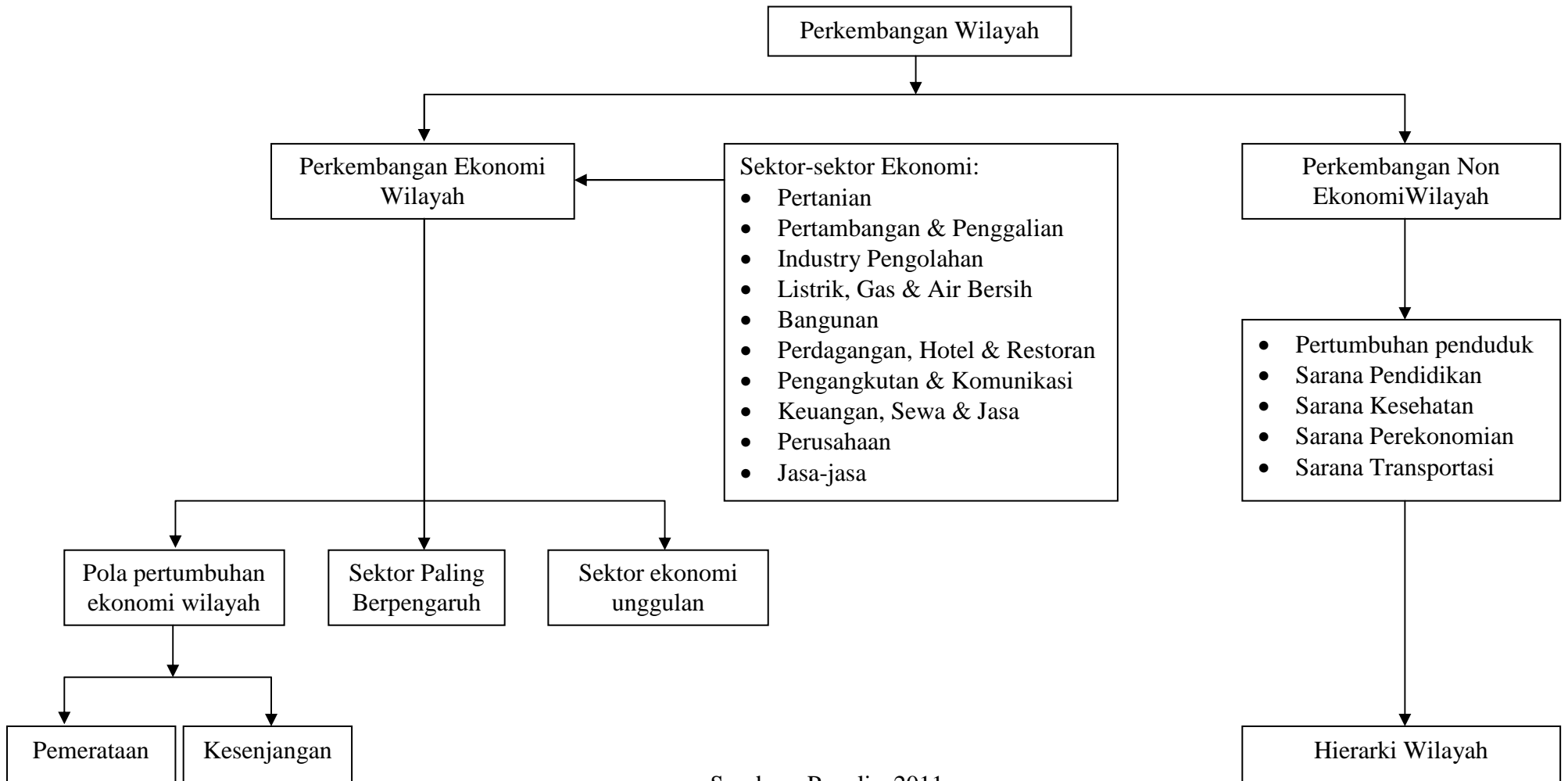
Tabel 1.4 Perbandingan Penelitian Sebelumnya dengan Peneliti

Penelitian	Judul Penelitian	Tujuan	Metode	Hasil
Puji Widodo (2002)	Evaluasi Geografis Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Wilayah di Kabupaten Semarang Periode 1994-1997	-Mengetahui pola pertumbuhan ekonomi wilayah di Kabupaten Semarang. -Mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah	-Analisis data sekunder (Skoring, T-test, Regresi Ganda).	-Kecenderungan pertumbuhan ekonomi di kabupaten Semarang terjadi dua proses yaitu <i>spread effects</i> dan <i>backwash effects</i> . Spread effects terjadi karena Kecamatan Ungaran dan Ambarawa yang berkedudukan sebagai SWP I dan SWP II menempati hierarki tertinggi, dan mampu mendorong pertumbuhan wilayah sekitarnya. -Pertumbuhan jumlah penduduk merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Semarang dengan kontribusi sebesar 82,4 %
Nugroho Adi Prabowo (2005)	Analisis Tingkat Perkembangan Wilayah di Sub Wilayah Pembangunan (SWP) I Kabupaten Boyolali Jawa Tengah	-Mengetahui hubungan antara ketersediaan fasilitas sosial ekonomi , dengan tingkat perkembangan wilayah di SWP I Kab. Boyolali. -Mengetahui hubungan daya layan fasilitas sosial ekonomi dengan tingkat perkembangan wilayah.	-Analisis data sekunder (survei instansional, analisis kuantitatif, korelasi, peta, dan deskriptif kualitatif).	-Distribusi fasilitas pelayanan ekonomi di SWP I Kabupaten Boyolali tersebar merata. -Daya fasilitas sosial ekonomi kategori baik yaitu Kecamatan Banyudono dan Sawit dengan skor 30, sedang berada di Kecamatan Ngemplak dan Mojosongo dengan skor 28. Sedangkan kategori kelas rendah terdapat di Kecamatan Teras dengan skor 27. -Adanya hubungan yang positif antara ketersediaan dan daya layan fasilitas sosial ekonomi tingkat perkembangan wilayah.

Tri Murtopo (2009)	Kajian Tingkat Perkembangan Wilayah untuk Penentuan prioritas Pengembangan di Kabupaten Boyolali Jawa Tengah	-Mengetahui perbedaan tingkat perkembangan wilayah. -Mengetahui pola persebarannya tingkat perkembangan wilayah . -Menetapkan wilayah prioritas pengembangan.	-Analisis data sekunder(Survei instansional, Skoring, Peta).	-Pola perkembangan wilayah Kabupaten Boyolali untuk tingkat perkembangan rendah, sedang, dan tinggi pada tahun 2006 yaitu memiliki pola cenderung seragam (uniform), acak (random), dan mendekati seragam (uniform) - Prioritas pengembangan dilakukan dengan dua analisa yaitu analisa komparatif nilai potensi sosio demografi, kontribusi tenaga kerja disektor industri dan aksesibilitas wilayah tahun 2002 dan 2006.
Wiyatri (2011)	Kajian Pertumbuhan Ekonomi Wilayah di kabupaten Sukoharjo Periode 2004-2008	-Mengetahui pola pertumbuhan ekonomi wilayah di Kabupaten Sukoharjo. - Mengetahui sektor yang paling berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi antar wilayah di Kabupaten Sukoharjo - Mengetahui sektor unggulan masing-masing kecamatan di Kabupaten Sukoharjo	-Analisis data sekunder (Skoring,t-test, Regresi Ganda, LQ).	

### 1.6 Kerangka Penelitian

Sumber daya dalam suatu wilayah merupakan perpaduan antara sumber daya manusia dan sumber daya alamnya. Manusia memiliki dinamika baik secara demografi maupun fungsional. Dinamika demografi beberapa jumlah, komposisi, dan perpindahan manusia yang berjalan atas faktor kelahiran, kematian, migrasi, dan mobilitasnya. Dinamika fungsional diindikasikan dari kehidupan manusia baik dari segi sosial, ekonomi, politik, dan budaya.



Sumber : Penulis, 2011  
 Gambar Diagram Alir Penelitian



Dinamika fungsional merupakan sasaran pembangunan dimana tujuannya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup dan fasilitas pelayanan sehingga manusia sejahtera. Dengan melihat potensi wilayah yang ada, tingkat perkembangan wilayah dapat diketahui hal-hal yang melatarbelakanginya.

Sebagaimana diuraikan dimuka sebelumnya, masalah kesenjangan laju pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi antar wilayah merupakan konsekuensi logis dari pembangunan, sebab setiap daerah mempunyai potensi yang berbeda untuk dikembangkan disamping keterbatasan dana pembangunan.

Struktur atau karakteristik perekonomian suatu wilayah dalam suatu periode tertentu dapat diamati dari PDRB dan pertumbuhannya. Dengan memperhatikan series agregat selama beberapa tahun dapat diketahui pergeseran yang terjadi di antara wilayah-wilayah tersebut. Penelitian ini menggunakan beberapa indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi wilayah. Indikator yang dipakai tersebut adalah:

1. Pertumbuhan Penduduk
2. Sarana Pendidikan
3. Sarana Kesehatan
4. Sarana Perdagangan
5. Sarana Perhubungan

Kajian pertumbuhan ekonomi wilayah di Kabupaten Sukoharjo nantinya mengarah pada pemerataan atau ketidakmerataan. Hasilnya berupa pola pertumbuhan ekonomi wilayah dan sektor yang paling berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi serta sektor unggulan wilayah di Kabupaten Sukoharjo.

### **1.7 Hipotesis**

1. Pola pertumbuhan ekonomi wilayah yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo cenderung menuju ke arah kesenjangan (*Backwash Effects*).
2. Sektor yang paling berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah adalah sektor keuangan, sewa & jasa perusahaan
3. Sektor unggulan di wilayah inti didominasi sektor perdagangan dan wilayah pengembangan didominasi sektor pertanian.

## **1.8 Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode analisa data sekunder. Menurut Masri Singarimbun (1982), analisa data sekunder adalah sebuah upaya pengkajian yang berlandaskan pada data statistik yang dipublikasikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ditambah dengan rujukan pada karya-karya ilmiah yang ada hubungannya dengan penelitian. Langkah-langkah dalam penelitian ini adalah :

### **1.8.1 Pemilihan Daerah Penelitian**

Peranan wilayah sub nasional, yaitu apakah kabupaten dan kota dalam mempengaruhi lokasi aktivitas ekonomi memang semakin penting. Berbagai studi dalam bidang sosial ekonomi dan perubahan sosial menekankan semakin pentingnya daerah dan peran barunya sebagai pelaku ekonomi dalam konfigurasi baru pola pembangunan spasial. (Rori gues Rose ,1998 dalam Mudrajat Kuncoro : 2003)

Sejalan dengan teori di atas, penelitian ini akan memfokuskan analisis pada daerah. Untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi wilayah digunakan data pada tingkat yang lebih kecil dari kabupaten yaitu pada tingkat kecamatan. Setelah perekonomian kecamatan teridentifikasi, maka dimungkinkan untuk menganalisis dinamika pertumbuhan ekonomi kabupaten. Kemudian membandingkan pertumbuhan ekonomi antar kecamatan apakah terjadi pemerataan atautkah ketidakmerataan.

Dipilihnya kabupaten Sukoharjo sebagai daerah penelitian dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Dalam kurun waktu 2004-2008 perkembangan perekonomian kabupaten Sukoharjo cenderung kearah yang lebih baik. Dimana Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2008 mempunyai pertumbuhan ekonomi 4,84%, sedang laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah 5,46%. Sehingga Kabupaten Sukoharjo menawarkan pasar besar yang potensial dan penting untuk dikaji seperti perkembangan ekonomi di sektor pertanian, industri, dan perdagangan.
2. Ketersediaan dan kemudahan peneliti dalam memperoleh data.

### **1.8.2 Teknik Pengambilan Data**

Penelitian ini mengandalkan beberapa data sekunder yang diperoleh dari instansi pemerintahan yang berhubungan dengan penelitian secara khusus, data yang digunakan adalah.

1. Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Sukoharjo Tahun 2003-2012.
2. PDRB : PDRB ADHK 2000 Kabupaten Sukoharjo Tahun 2004-2008 tiap kecamatan, PDRB ADHK 2000 Kabupaten Sukoharjo Tahun 2004-2008 tiap sektor, Kontribusi sektor PDRB ADHK 2000 Tahun 2004-2008.
3. Penduduk: komposisi penduduk, kepadatan penduduk, pertumbuhan penduduk.
4. Transportasi dan komunikasi : jumlah sarana transportasi dan jumlah sarana komunikasi
5. Pendidikan : jumlah sekolah berdasar tingkatannya (SD, SMP, SMA, PT)
6. Sarana perekonomian : jumlah koperasi, pasar, dan Bank
7. Sarana kesehatan : jumlah fasilitas kesehatan (Balai Pengobatan (BP), Apotik, Dokter, Pustu, Puskesmas, BKIA/RB, RS).

### **1.8.3 Analisa Data**

Analisa data bertujuan untuk menyederhanakan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang dikumpulkan diseleksi kemudian diolah. Selanjutnya diambil keputusan atas dasar hasil analisa yang telah dilakukan. Berikut ini adalah analisa data yang digunakan :

#### **1.8.3.1 Analisa Skoring**

Salah satu teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa tabel skoring. Namun, sebelum dilakukan skoring langkah yang harus dilakukan adalah memberi asumsi terhadap indikator-indikator yang telah terpilih. Bahwa untuk melihat distribusi pertumbuhan wilayah dengan melihat perbedaan total skor keseluruhan indikator-indikator yang ada.

Tabel 1.5 Indikator Pertumbuhan Wilayah

Indikator	Asumsi
1. Jumlah penduduk	Semakin banyak jumlah penduduk, semakin banyak pula sumber daya manusia yang dapat dikaryakan dalam pertumbuhan wilayah.
2. Sarana Perekonomian	Semakin banyak jumlah sarana dan prasarana perdagangan, maka makin banyak transaksi yang terjadi di suatu wilayah
3. Sarana Pendidikan	Makin tinggi jumlah fasilitas pendidikan suatu wilayah, berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia yang lebih tinggi pula.
4. Sarana Kesehatan	Makin lengkapnya fasilitas kesehatan yang dimiliki wilayah menunjukkan tingginya tingkat kepedulian masyarakat akan kesehatan yang berakibat pada tingginya pertumbuhan wilayah
5. Sarana Transportasi	Makin tingginya jumlah penduduk, kondisi perdagangan, dan pendidikan memacu tumbuhnya sarana transportasi. Guna memudahkan pendistribusian hasil-hasil pembangunan

Sumber : Analisa Penulis, 2011

Langkah selanjutnya adalah memberikan standar penilaian indikator yang telah ditentukan, kemudian baru pada tahap skoring. Dalam penelitian ini, teknik skoring digunakan untuk menentukan hierarki wilayah. Dimana data yang tersedia dicari jangkauan kelas dengan rumus *sturgess* yaitu data tertinggi dikurangi data terendah kemudian dibagi tiga. Selanjutnya dicari skornya, dimana kelas tinggi diberi skor 3, kelas sedang diberi skor 2, kelas rendah diberi skor 1. Setelah

masing-masing indikator diskoring, kemudian dicari nilai komulatifnya dengan menggabungkan nilai per indikator tiap kecamatan.

Tabel 1.6  
Penilaian Indikator Pertumbuhan Wilayah

No	Indikator	Jenis	Standar jumlah Penduduk yang dilayani	Bobot
1	Pendidikan	SD	1.600	1
		SMP	4.800	2
		SMA	4.800	3
		Perguruan Tinggi	70.000	4
2	Kesehatan	Posyandu	1.000	1
		Balai Pengobatan (BP)	3.000	1
		Apotik	3.000	1
		Dokter	3.000	2
		Puskesmas Pembantu(Pustu)	15.000	2
		Puskesmas	30.000	3
		BKIA/Rumah Bersalin(RB)	10.000	3
		Rumah Sakit(RS)	120.000	4
3	Perdagangan dan jasa	Pasar	30.000	1
		Toko	25.000	2
		Warung	25.000	3

Sumber : Henk Huisman, 1989 & Dep. DPU

NB : Sebagian penilaian indikator yang belum tercantum akan menggunakan penilaian penulis, contoh: Bank, koperasi, fasilitas perhubungan tidak terdapat pedoman standar pelayanan sehingga menggunakan skor relatif.

### 1.8.3.2 Analisa T- tes

Analisa ini digunakan untuk membandingkan dua ukuran kecenderungan sentral dan untuk menemukan bahwa ada perbedaan antara kedua ukuran tersebut. Dalam hal ini yang dianalisa adalah daerah pusat pengembangan SWP dengan cakupannya. Sehingga diketahui kecenderungannya dari pola pertumbuhan ekonomi wilayah, dengan rumus sebagai berikut

$$t = \frac{M a - M b}{\sqrt{\left[ \frac{\sum X a^2 + \sum X b^2}{na + nb - 2} \right] \left[ \frac{1}{na} + \frac{1}{nb} \right]}}$$

(Sutrisno Hadi, 1995)

Keterangan:

- Ma : Rata-rata PDRB wilayah inti  
 Mb : Rata-rata PDRB wilayah pinggiran  
 Xa : Deviasi dari Ma  
 Xb : Deviasi dari Mb  
 na : Jumlah subyek wilayah inti  
 nb : Jumlah subyek wilayah pinggiran  
 db : na + nb-2

Dimana :

$$Ma = \frac{\sum Xa}{na}$$

$$Mb = \frac{\sum Xb}{nb}$$

$$\sum X a^2 = \sum X a^2 - \left[ \frac{\sum X a}{na} \right]^2$$

$$\sum X b^2 = \sum X b^2 - \left[ \frac{\sum X b}{nb} \right]^2$$

Tabel Hasil Uji-Test untuk Pola Pertumbuhan Ekonomi SWP X

Sektor	Mean		t- hitung	t- tabel	Hasil
	Inti	Pinggiran			

Hasil perhitungan disesuaikan dengan tabel t dengan tingkat kebebasan db = na+nb-2 dan taraf signifikansi 0,05 atau 5%. Jika t-tabel lebih besar dari t hitung (t-tabel > t-hitung) maka dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan antara kedua ukuran yang diperbandingkan. Dengan demikian maka proses pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut adalah pemerataan antar wilayah (*Spread effects*). Dan apabila t-tabel lebih kecil dari t-hitung (t-tabel < t-hitung ), maka proses pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut adalah kesenjangan (*Backwash effects*). Tanda minus(-) pada t-hitung atau t-tabel tidak diperhitungkan, namun tanda minus(-) tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor tersebut didaerah bertanda minus tersebut lebih kecil dari pada di daerah lawannya atau apabila terjadi proses *Backwash effects* maka kesenjangan tersebut terjadi didaerah bertanda minus tersebut.

### 1.8.3.3 Analisa Regresi Ganda

Analisa regresi ganda digunakan untuk meramalkan keadaan naik turunnya variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis regresi ganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2. Pada penelitian ini , analisis regresi ganda digunakan untuk mencari sektor yang berpengaruh dan yang paling dominan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah, dengan unit analisis tiap SWP dan tiap kecamatan. Variabel yang digunakan adalah nilai pertambahan tiap sektor. Dan sistem pengolahannya dengan SPSS. Rumus yang digunakan adalah :

$$Y = a_0 + a_1X_1 + a_2X_2 + \dots + a_9X_9$$

Keterangan :

a = Nilai Multiplier

$a_1, \text{ dst}$  = nilai multiplier  $X_1, \text{ dst}$

$X_1$  = Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB

$X_2$  = Kontribusi Sektor Pertambangan dan penggalian terhadap PDRB

$X_3$  = Kontribusi Sektor Industri pengolahan terhadap PDRB

$X_4$  = Kontribusi Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih terhadap PDRB

$X_5$  = Kontribusi Sektor Bangunan terhadap PDRB

$X_7$  = Kontribusi Sektor Pengangkutan terhadap PDRB

$X_8$  = Kontribusi Sektor Keuangan, sewa & Jasa Perusahaan terhadap PDRB

$X_9$  = Kontribusi Sektor Jasa-jasa terhadap PDRB

Y = Rata-rata pertumbuhan ekonomi

Tabel Sektor Dominan yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Wilayah tiap Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo Periode 2004-2008

No	SWP	Kecamatan	Sektor									Y
			X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	

Hasil perhitungan menunjukkan besaran masing masing nilai multiplier / koefisien (a) masing-masing sektor X. Dimana sektor yang mempunyai koefisien

(a) paling besar menunjukkan sektor tersebut adalah sektor yang paling berpengaruh (dominan) terhadap pertumbuhan ekonomi di SWP tersebut.

#### 1.8.3.4 Metode Location Quotient (LQ)

Untuk mengetahui potensi aktivitas ekonomi yang merupakan indikasi sektor basis dan non basis dapat digunakan metode *Location Quotient (LQ)*, yang merupakan perbandingan relatif antara kemampuan sektor yang sama pada daerah yang lebih luas dalam suatu wilayah. Sektor basis adalah suatu kegiatan sektor yang melayani pasar didaerah itu sendiri maupun diluar daerah tersebut. Sedangkan sektor non basis merupakan kegiatan sektor yang melayani pasar hanya di daerah tersebut saja. Formulasi LQ menurut Benavid-Val dalam bukunya Kuncoro(2003) adalah sebagai berikut:

$$LQ = \frac{X_r / RV_r}{X_n / RV_n} \quad (\text{Benavid - Val})$$

Keterangan :

$X_r$  = PDRB sektor i pada kecamatan                       $X_n$  = PDRB sektor i pada kabupaten

$RV_r$  = PDRB total kecamatan                                       $RV_n$  = PDRB total kabupaten

Tabel Perhitungan LQ Rata-Rata Wilayah Inti dan Wilayah Pengembangan  
Kabupaten Sukoharjo Periode 2004-2008

Lapangan Usaha	Wilayah Inti						Wilayah Pengembangan					
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L

Keterangan : A = Kartasura , B = Grogol , C = Mojolaban , D = Sukoharjo , E = Nguter , F = Tawang Sari G = Gatak , H = Baki , I = Polokarto , J = Bendosari , K = Bulu , L = Weru

Menurut Benavid – val, kriteria pengukuran LQ adalah sebagai berikut. Bila  $LQ > 1$ , berarti tingkat spesialisasi sektor tertentu ditingkat kecamatan lebih besar dari sektor yang sama di tingkat kabupaten. Hal ini menunjukkan bahwa sektor tersebut merupakan sektor unggulan di kecamatan tersebut dan potensial dikembangkan sebagai penggerak perekonomian. Bila  $LQ = 1$ , berarti bahwa tingkat spesialisasi sektor tertentu pada tingkat kecamatan sama dengan sektor yang sama pada tingkat kabupaten. Sedangkan bila  $LQ < 1$ , berarti spesialisasi



sektor tertentu ditingkat kecamatan lebih kecil dari sektor yang sama di tingkat kabupaten. Dan berarti sektor tersebut bukan sektor unggulan di kecamatan tersebut dan kurang potensial dikembangkan sebagai penggerak perekonomian kecamatan.

### **1.9 Batasan Operasional**

Angka Laju Pertumbuhan diperoleh dengan membagi nilai atas dasar harga berlaku dengan nilai atas dasar harga konstan, dimana untuk masing-masing tahunnya dikalikan 100.

Backwash Effects maksudnya wilayah-wilayah yang telah maju menciptakan keadaan yang menghambat perkembangan wilayah-wilayah yang masih terbelakang. (Ernan Rustiadi dkk, 2009)

Disparitas Pembangunan adalah Kesenjangan pembangunan antar wilayah sebagai akibat investasi dan sumber daya yang terserap dan terkonsentrasi di perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan, sementara wilayah-wilayah hinterland mengalami pengurasan sumber daya yang berlebihan.

Ekonomi Wilayah merupakan suatu kondisi terciptanya sumbangan terhadap PDRB, pendapatan perkapita, dan sumbangan tenaga kerja dari sektor industri yang mengakibatkan adanya pertumbuhan, pemerataan, dan keterkaitan dengan sektor perdagangan, pengangkutan dan komunikasi, serta sektor jasa. (PDRB Kabupaten Sukoharjo 2008)

Hierarki adalah suatu konsep yang mengemukakan tata jenjang. (Hadi Sabari Yunus, 2010)

Ketersediaan yaitu kesiapan suatu sarana (tenaga, modal, dan anggaran) untuk dapat digunakan /dioperasikan; keadaan tersedia. (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Pembangunan dalam penelitian ini adalah melakukan kegiatan-kegiatan membangun yang bersifat fisik, atau secara lebih sempit membangun infrastruktur /fasilitas fisik. (Ernan Rustiadi dkk, 2009)

Persediaan yaitu perihal tersedia, cadangan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Pertumbuhan adalah perubahan keadaan dari suatu keadaan ke keadaan yang lain dalam waktu yang berbeda. (PDRB Kabupaten Sukoharjo 2008)

Pertumbuhan Ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang ditinjau dari sudut penyebaran kegiatan ke berbagai lokasi dalam ruang ekonomi tertentu, dalam hal ini yang diteliti adalah SWP dan kecamatan. ( Sadono Sukirno,1976 )

PDRB adalah jumlah nilai tambah dari faktor-faktor produksi dalam kurun waktu tertentu di suatu wilayah. Dimana dalam penelitian ini nilai tambah diperoleh dari 9 sektor yang ada di wilayah tersebut. (PDRB kabupaten Sukoharjo 2008)

PDRB Harga Berlaku yaitu nilai barang dan jasa yang dihitung berdasarkan pada harga berlaku pada tahun tersebut.

PDRB Harga Konstan yaitu menilai faktor produksi atas dasar pada tahun dasar (yaitu 2000), dimana dari nilai konstan ini akan tergambar tingkat produktivitas dan kapasitas produksi untuk setiap lapangan usaha. (PDRB kabupaten Sukoharjo 2008)

Sektor Unggulan adalah sektor yang dapat menunjang dan mempercepat pembangunan dan pertumbuhan perekonomian daerah yang berdasarkan kriteria tingkat kemampuan sektor dalam kontribusi penerimaan PDRB daerah, tingkat kemampuan tenaga kerja, potensial penghasil komoditas ekspor dan tingkat keterkaitan yang kuat dengan sektor lainnya.(Darmawansyah ,2003 dalam Sukiman,2008).

Spread Effects adalah wilayah-wilayah yang telah lebih maju menciptakan keadaan yang menghambat perkembangan wilayah-wilayah yang masih terbelakang .(Ernan Rustiadi dkk, 2009)

Wilayah adalah suatu ruang sudut ekonomi yang berada dibawah suatu administrasi tertentu. (Myrdal,1976)

Wilayah inti adalah wilayah yang ditetapkan sebagai pusat pertumbuhan dari sub wilayah pembangunan, yang diharapkan dapat menyediakan fasilitas-fasilitas yang diperlukan oleh wilayah cakupannya. (Myrdal,1976)

Wilayah pinggiran adalah wilayah yang terdiri atas beberapa kecamatan dan wilayah tersebut masih menjadi cakupan dari sub wilayah pembangunan. (Myrdal,1976).